

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah lima tahun berlalu sejak ratusan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang disiksa ditemukan ditinggalkan dan melarat di pulau terpencil di Indonesia bagian timur. Kasus pelanggaran HAM di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku melibatkan pelecehan fisik maupun mental dan adanya tindakan kekerasan, bahkan dipukuli hingga mati. Pembunuhan tersebut diketahui karena tidak jauh dari titik tempat pengekapan, ditemukan adanya kuburan masal. Terdapat puluhan jenazah dilihat melalui plang nama kayu sebagai tanda bersemayam diduga yang menjadi korban penganiayaan. Sejumlah 682 ABK asing di Benjina menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Perbudakan, penganiayaan, dan penggelapan para ABK asing merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Benjina tahun 2015. Para ABK tersebut datang dari seluruh penjuru antara lain Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka bekerja selama kurang lebih 20-22 jam per hari selama tujuh hari dengan waktu istirahat yang sangat minim.

Pelanggaran HAM terhadap ratusan ABK tersebut diungkapkan oleh kantor berita bernama *Associated Press* (AP) yang menginvestigasi untuk pertama

¹ Mas Achmad Santosa, "Strategy On The Prevention And Eradication of IUU Fishing & Post-Moratorium Policies," Kementerian Kelautan dan Perikanan, http://fisheriestransparency.org/wp-content/uploads/2015/11/Presentation_Combating_IUUF_Efforts_in_Indonesia_20151109.pdf (diakses 4 Agustus 2020).

kalinya. AP telah mengungkap industri kriminal tersembunyi di salah satu pulau terpencil di Indonesia, Benjina. Tidak hanya mengungkap meluasnya pelanggaran HAM tersebut, tetapi juga hubungan Thailand dengan Amerika Serikat, tim wartawan AP memenangkan Hadiah Pulitzer untuk Layanan Publik dan mendapatkan IRE (*Investigative Reporters and Editors*) Medal untuk pekerjaan mereka.² Penyelidikan yang dilakukan oleh tim wartawan AP secara drastis mengubah kehidupan para ABK yang terikat menjadi tenaga kerja tersebut. Di Benjina, para wartawan melihat beberapa orang berada di dalam sangkar karena terlalu sering mencoba melarikan diri. Orang yang tidak berhasil melarikan diri dimakamkan di kuburan di hutan dengan nama palsu yang mereka berikan untuk menutupi fakta bahwa mereka bekerja secara ilegal.

Membuktikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Benjina hanyalah suatu langkah awal. Memperlihatkan makanan laut yang ditangkap oleh para ABK asing ke pasar Amerika Serikat juga menjadi tantangan. Hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh para ABK tersebut berupa makanan laut diekspor ke supermarket dan restoran di Amerika Serikat. Wartawan mulai melacak pengiriman makanan laut dari Benjina dengan menggunakan alat yang disebut *Marine Tracker*. Mereka melacaknya ke Pelabuhan Samut Sakhon, yang terletak di dekat Bangkok, Thailand. Di sana, wartawan mengamati makanan laut itu diturunkan ke truk. Wartawan kemudian mengikuti truk selama empat malam ke pabrik-pabrik di sekitar kota. Setelah mengamati

² Investigative Reporters & Editors, "Satellites and secret cameras: How the Associated Press freed 2,000 slaves," Juni 19, 2016, <https://www.ire.org/archives/30433> (diakses 6 Agustus 2020).

pabrik di sekitar kota di Thailand, mereka kemudian melacak lagi pengiriman makanan laut itu ke perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat melalui catatan Bea Cukai Amerika Serikat. AP menemukan bahwa pengiriman makanan laut sedang menuju Amerika Serikat. Alhasil, makanan laut tersebut berakhir di supermarket dan restoran Amerika Serikat. Karena adanya pembuktian tersebut, dampak dari pelaporan itu langsung terasa sehingga mengakibatkan pembebasan para ABK di Benjina.

Sebagian korban yang diwawancarai AP menyatakan akan dicambuk menggunakan buntut ikan pari beracun jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Salah seorang ABK yang berhasil melarikan diri, Hlaing Min, mengaku banyak dari ABK tersebut yang akhirnya mati di laut.³ Karena itu, mereka berusaha untuk melarikan diri agar diselamatkan dari siksaan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Sekitar 322 ABK diselamatkan dan dievakuasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia ke Tual, Indonesia. Mereka menjadi korban kerja paksa oleh salah satu perusahaan perikanan terbesar di Indonesia Timur, PT. Pusaka Benjina Resources (PBR). Perusahaan ini mengoperasikan lusinan kapal yang ditemukan oleh AP yang memiliki kapten Thailand dan diduga milik Thailand. Pekerja di kapal-kapal itu sering diberi nama dan dokumentasi Thailand palsu untuk menutupi fakta bahwa mereka bekerja secara ilegal. Mereka dapat terus beroperasi karena melakukan suap kepada tingkat atas pemerintah Indonesia. Kapal-kapal ilegal

³ BBC News, "Sidang kasus 'perbudakan' di Benjina digelar." November 18, 2015, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_benjina_tual (diakses 6 Agustus 2020).

Thailand secara tidak sah terdaftar untuk menangkap ikan di Indonesia melalui korupsi, kadang-kadang dengan bantuan otoritas pemerintah dan mengizinkan kapal asing untuk mengubah bendera sebagai milik Indonesia. Praporn Ekouru, mantan anggota Parlemen Thailand, mengaku telah menyuap pejabat Indonesia agar bisa masuk ke perairan Indonesia. Thailand membayar suap jutaan baht per tahun, atau sekitar 200.000 baht (\$6.100) per bulan.⁴

Karenanya, KKP dengan seluruh aparat penegak hukum segera berusaha untuk membebaskan ratusan ABK yang terkurung di kawasan tersebut. Para ABK dari berbagai negara di Asia Tenggara dibawa ke Benjina untuk bekerja, beberapa dari mereka diculik atau dipancing dengan menggunakan prospek palsu pekerjaan restoran. Selama 10 tahun, mereka bekerja tanpa bayaran atau makanan dan air yang memadai, dan bekerja di bawah kekerasan. Orang-orang yang diwawancarai AP tentang Benjina kebanyakan berasal dari Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Karena orang-orang dari Burma dilanda kemiskinan, mereka terpicat oleh janji upah tinggi dan kemudian terjebak di atas kapal dan pulau terpencil. ABK asing tersebut dibawa ke Indonesia melalui Thailand dan dipaksa untuk menangkap ikan. Kemudian, hasil tangkapan dari para ABK asing dikirim kembali ke Thailand, di mana ikan-ikan tersebut memasuki arus perdagangan global.

⁴ Abby Phillip, "Nearly 550 modern-day slaves were rescued from Indonesia's fish trade. And that's just the beginning," April 11, 2015, <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/04/10/nearly-550-modern-day-slaves-were-rescued-from-indonesias-fish-trade-and-thats-just-the-beginning/> (diakses 5 Agustus 2020).

Untuk mendapatkan rekaman para ABK di Benjina, wartawan memberikan kamera kepada seorang pekerja migran di pulau itu. Para ABK itu sangat ingin pulang, dan meskipun ada bahaya, ingin berbicara dengan wartawan. Untuk sampai ke mereka, wartawan menarik perahu mendekati kapal penangkap ikan dan melakukan wawancara berteriak bolak-balik.⁵ Pengakuan salah seorang ABK melalui wawancara menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah dieksploitasi sekitar 10 tahun tanpa diberikan bayaran. Bukan hanya itu, mereka juga dilecehkan dan dikurung dalam sel, serta mendapatkan banyak luka lebam dan sayatan di sekujur tubuh yang menjadi bukti terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh kapten kapal dan para pegawai PT. Pusaka Benjina Resources.

Investigasi oleh AP mendorong pemerintah Indonesia untuk memulai penyelamatan. Menurut Agence France-Presse (AFP), sebuah kantor berita global terkemuka, Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014-2019 mengatakan bahwa perihal tersebut harus segera diselesaikan karena memalukan bagi bangsa Indonesia dan pemerintah menyiapkan tim khusus untuk menyelidiki situasi di pulau itu. Beliau mengawasi penyelamatan dan mendorong peningkatan hak asasi manusia di laut secara global. Terlebih lagi, apa yang terjadi di Benjina telah menyita perhatian dunia.

Dengan melihat permasalahan pelanggaran hak para ABK asing ini, penulis akan menggunakan teori neoliberalisme untuk menjelaskan melalui kacamata teori Hubungan Internasional. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan

⁵ Phillip, "Nearly 550 modern-day slaves were rescued from Indonesia's fish trade."

konsep-konsep penting terkait dengan isu tersebut antara lain organisasi internasional, hak asasi manusia, perbudakan modern, hubungan multilateralisme, dan kejahatan transnasional. Penulis memilih teori dan beberapa konsep tersebut karena melihat adanya keterlibatan dari beberapa negara asal ABK asing seperti Myanmar, Kamboja, Laos, yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan asal Thailand. Bukan hanya itu, penulis juga menekankan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan melalui perbudakan dan akan melibatkan upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah tersebut.

IOM merupakan sebuah organisasi antarpemerintah yang berdiri pada tahun 1951 di tengah kekacauan dan pengungsian Eropa Barat setelah Perang Dunia II. IOM, yang pertama kali dikenal dengan *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME), bergerak dalam bidang migrasi dan bekerja sama baik dengan pemerintah, antarpemerintah, maupun non-pemerintah.⁶ IOM berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi untuk kepentingan semua pihak. Itu dilakukan dengan memberikan layanan dan nasihat kepada pemerintah dan migran. Selain itu, IOM juga bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional tentang masalah migrasi, untuk membantu dalam mencari solusi praktis untuk masalah migrasi, dan untuk bantuan kemanusiaan

⁶ International Organization for Migration, "IOM History," <https://www.iom.int/iom-history> (diakses 14 September 2020).

kepada para migran yang membutuhkan.⁷ Oleh karena itu, IOM beserta pemerintah Indonesia mempunyai peranan penting untuk menangani masalah pelanggaran hak para ABK asing tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi mengenai keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM terhadap ABK di Benjina, Kepulauan Aru yang terjadi pada tahun 2015. Selain itu, penulis juga akan membahas peran dari salah satu organisasi internasional yang juga menjadi Organisasi Terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dalam kasus eksploitasi ABK di Benjina tersebut. Pembahasan ini diperlukan karena menjadi fokus penulis untuk memberitahukan pembaca upaya yang dilakukan dua aktor penting, Pemerintah Indonesia dan IOM, dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berdasarkan topik yang akan dibahas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM terhadap ABK asing di Benjina tahun 2015?

⁷ International Organization for Migration, "About IOM," <https://www.iom.int/about-iom> (diakses 14 September 2020).

2. Bagaimana keterlibatan *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM terhadap ABK asing di Benjina tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

1. Mendapatkan gambaran mengenai peran Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM terhadap ABK asing di Benjina tahun 2015.
2. Mendapatkan gambaran mengenai keterlibatan *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM terhadap ABK asing di Benjina tahun 2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat kegunaan yang dapat diberikan kepada pembaca. Kegunaan tersebut yaitu:

1. Menambah wawasan dari gambaran dan fakta-fakta dari permasalahan pelanggaran HAM terhadap ABK asing yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina pada tahun 2015.
2. Menambah wawasan mengenai bagaimana kedua aktor tersebut – Pemerintah Indonesia dan IOM – ikut serta dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Benjina.

3. Menjadi sebuah referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian lain yang sudah dipublikasikan mengenai topik peran aktor negara, Indonesia, maupun aktor non-negara, IOM, dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM terhadap ABK asing di Benjina tahun 2015.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibagi menjadi lima bagian yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan penjelasan awal yang singkat dan latar belakang mengenai permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources pada tahun 2015 di Benjina. Penulis juga akan menyampaikan latar belakang terkait dengan *International Organization for Migration* (IOM) beserta teori neoliberalisme dan beberapa konsep antara lain perbudakan modern, kejahatan terorganisir transnasional, organisasi internasional, Hak Asasi Manusia, dan hubungan multilateralisme yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berisi seluruh aspek yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan kegunaan penelitian dan penjelasan mengenai sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Bab ini akan berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dari data yang digunakan di dalam penelitian ini yang didapatkan dari penelitian-

penelitian dengan topik yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka akan dijadikan acuan penulis untuk melihat pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini juga berisi kerangka teori dan konsep-konsep penting yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian dan pendekatan ilmiah yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta teknik analisis dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjadi bagian penulis menjabarkan hasil penelitian yang telah digunakan sekaligus memberikan analisis dan menjawab rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan bagaimana keterlibatan Pemerintah Indonesia dan IOM dalam menangani permasalahan pelanggaran HAM terhadap para ABK asing pada tahun 2015 di Benjina.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari empat bab sebelumnya. Selain mengutarakan hasil pembahasan, peneliti juga akan menyampaikan

signifikansi pentingnya dan konsekuensi yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan penulisan ini.

